

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Triwulan IV Tahun 2023**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan IV ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 3 program, 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD Triwulan IV ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan didaerah.

Lunang, Januari 2024

 CAMATLUNANG,

SUNARDI, S.Pd. M.TPd
Pembina (IV/a)
NIP.19751128 200604 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan

RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2024.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.

- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51% ≤65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Lunang melalui 3 program, 7 Kegiatan dan 15 sub kegiatan, dengan anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 1.405.182.053,- Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.333.522.183,- dengan capaian kinerja RPJMD 94,90% (Sangat Tinggi) dan capaian keuangan 94,90% (Sangat Tinggi).

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2023

No	Urusan	Anggaran P-APBD 2023	Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	1.405.182.053	1.333.522.183	94,90	ST	94,90	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2023 Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Lunang sangat beragam, dan memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Tinggi (ST) dan realisasi anggaran Tinggi (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Karena adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lunang, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari data capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV, Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Lunang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Lunang dapat cepat diketahui.

- b. Camat Kecamatan Lunang agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN LUNANG TAHUN TAHUN 2023

KONDISI TRIWULAN IV TAHUN 2023

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1,397,344,553	1,325,684,683	94.87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,402,534,688	1,397,344,553	1,325,684,683	94.87
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,866,020	2,866,020	2,858,500	99.74
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	-
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,866,020	2,866,020	2,858,500	99.74
						Administrasi Keuangan	1,150,854,688	1,141,682,053	1,071,933,443	93.89
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,111,854,688	1,107,182,053	1,037,433,443	93.70
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,000,000	34,500,000	34,500,000	100.00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	0	0	-
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	-
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	0	0	-
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	-
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	-
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	-
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	-
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	125,498,377	135,232,876	134,049,600	99.13

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,007,990	2,007,990	2,003,000	99.75
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,770,888	-	-	-
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,130,579	16,130,579	16,122,500	99.95
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,184,920	4,184,920	4,166,500	99.56
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	600,000	600,000	600,000	100.00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	-	-
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,804,000	112,309,387	111,157,600	98.97
						Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,005,903	56,253,904	56,066,640	99.67
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	7,200,000	6,248,000	6,065,752	97.08
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54,805,903	50,005,904	50,000,888	99.99
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,309,700	61,309,700	60,776,500	99.13
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	27,049,700	27,049,700	26,526,500	98.07
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	32,160,000	32,160,000	32,150,000	99.97
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	0	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	-	-	0	-
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	-	-	0	-
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-
							-	-	0	-
							-	-	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	Persentase Ketercapaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,820,000	4,820,000	100.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,820,000	4,820,000	4,820,000	100.00
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,820,000	4,820,000	4,820,000	100.00
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,820,000	4,820,000	4,820,000	100.00
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-
							-	-	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,017,500	3,017,500	100.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,500,000	3,017,500	3,017,500	100.00
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,500,000	3,017,500	3,017,500	100.00
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2,500,000	3,017,500	3,017,500	100.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari yang Baik	Persentase Ketercapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	0	-	-
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0	-	-
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-
						Fasilitasi Penetapan Pembangunan Kawasan Pedesaan	-		0	-
							-		0	-
	TOTAL		1,405,182,053	1,333,522,183	94.90		1,405,182,053	1,405,182,053	1,333,522,183	94.90

Lunang, 12 Desember 2023

Camat Lunang



CAMATLUNANG,

[Signature]
SUNARDI, S.Pd., M.TPd
 Pembina (IV/a)
 NIP.19751128 200604 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000. - KECAMATAN LUNANG
Pegguna Anggaran : SUNARDI, S.Pd.M.TPd
Bendahara Pengeluaran : MURNIATI, S.Sos
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : Desember

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	1.405.182.053	936.158.416	101.275.027	1.037.433.443	-	-	-	281.057.492,00	15,031,248,00	296.088.740,00	1.333.522.183,00	71.659.870,00
7.01.7.01.0.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.141.682.053	-	-	-	-	-	-	32.150.000,00	2,350,000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	1.107.182.053,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.107.182.053	936.158.416	101.275.027	1.037.433.443	-	-	-	-	0,00	-	1.037.433.443,00	69.748.610,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	535.328.286	480.179.528	34.459.500	514.639.028	-	-	-	-	0,00	-	514.639.028,00	20.689.258,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.842.474	49.651.224	3.469.538	53.120.762	-	-	-	-	0,00	-	53.120.762,00	1.721.712,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66.650.000	50.670.000	2.830.000	53.500.000	-	-	-	-	0,00	-	53.500.000,00	13.150.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.812.000	2.775.000	-	2.775.000	-	-	-	-	0,00	-	2.775.000,00	37.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.170.776	26.650.560	1.882.920	28.533.480	-	-	-	-	0,00	-	28.533.480,00	637.296,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.218.784	2.967.444	9.404	2.976.848	-	-	-	-	0,00	-	2.976.848,00	241.936,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.345	5.562	355	5.917	-	-	-	-	0,00	-	5.917,00	8.428,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.01.09.000 1.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	40.990.198	30.450.620	3.815.761	34.266.381	-	-	-	-	0,00	-	34.266.381,00	6.723.817,00
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.01.10.000 1.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.163.642	978.131	82.704	1.060.835	-	-	-	-	0,00	-	1.060.835,00	102.807,00
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.490.939	2.934.363	248.109	3.182.472	-	-	-	-	0,00	-	3.182.472,00	308.467,00
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.01.12.000 1.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.038.054	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.038.054,00
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.02.01.000 1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	366.414.555	288.895.984	54.476.736	343.372.720	-	-	-	-	0,00	-	343.372.720,00	23.041.835,00
7.01.7.01.0.001.2.02 .01.5.1.01.03.02.001 4.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000,00
7.01.7.01.0.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.866.020	-	-	-	-	-	-	2.858.500,00	0,00	2.858.500,00	2.858.500,00	7.520,00
7.01.7.01.0.001.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.866.020	-	-	-	-	-	-	2.858.500,00	0,00	2.858.500,00	2.858.500,00	7.520,00
7.01.7.01.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.231.100	-	-	-	-	-	-	2.228.500,00	0,00	2.228.500,00	2.228.500,00	2.600,00
7.01.7.01.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	634.920	-	-	-	-	-	-	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	4.920,00
7.01.7.01.0.001.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.500.000	-	-	-	-	-	-	32.150.000,00	2,350,000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.02 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.500.000	-	-	-	-	-	-	32.150.000,00	2,350,000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
7.01.7.01.0.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.232.876	-	-	-	-	-	-	127.598.600,00	6,451,000,00	134.049.600,00	134.049.600,00	1.183.276,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.007.990	-	-	-	-	-	-	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	4.990,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .01.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.007.990	-	-	-	-	-	-	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	4.990,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .02.5.2.02.06.01.000 2.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.130.579	-	-	-	-	-	-	15.892.500,00	230,000,00	16.122.500,00	16.122.500,00	8.079,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.130.579	-	-	-	-	-	-	14.122.500,00	0,00	14.122.500,00	14.122.500,00	8.079,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.770.000,00	230,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.184.920	-	-	-	-	-	-	4.166.500,00	0,00	4.166.500,00	4.166.500,00	18.420,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.184.920	-	-	-	-	-	-	4.166.500,00	0,00	4.166.500,00	4.166.500,00	18.420,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	100,000,00	600.000,00	600.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .06.5.1.02.02.01.006 2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	600.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	100,000,00	600.000,00	600.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.309.387	-	-	-	-	-	-	105.036.600,00	6,121,000,00	111.157.600,00	111.157.600,00	1.151.787,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
7.01.7.01.0.001.2.06 .09.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000	-	-	-	-	-	-	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.06 .09.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.181.637	-	-	-	-	-	-	-	6.031,000,00	6.031.000,00	6.031.000,00	1.150.637,00
7.01.7.01.0.001.2.06 .09.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92.807.750	-	-	-	-	-	-	92.716.600,00	90,000,00	92.806.600,00	92.806.600,00	1.150,00
7.01.7.01.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.253.904	-	-	-	-	-	-	51.546.392,00	4,520,248,00	56.066.640,00	56.066.640,00	187.264,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.248.000	-	-	-	-	-	-	5.545.504,00	520,248,00	6.065.752,00	6.065.752,00	182.248,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .02.5.1.02.02.01.005 9.	Belanja Tagihan Telepon	2.448.000	-	-	-	-	-	-	2.244.000,00	204,000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.08 .02.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	3.800.000	-	-	-	-	-	-	3.301.504,00	316,248,00	3.617.752,00	3.617.752,00	182.248,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.005.904	-	-	-	-	-	-	46.000.888,00	4,000,000,00	50.000.888,00	50.000.888,00	5.016,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.375.000	-	-	-	-	-	-	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	5.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.000.000	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00	3,000,000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	1,000,000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.02.02.000 3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.02.02.000 6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	280.402	-	-	-	-	-	-	280.392,00	0,00	280.392,00	280.392,00	10,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
7.01.7.01.0.001.2.08 .04.5.1.02.02.02.000 7.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	350.502	-	-	-	-	-	-	350.496,00	0,00	350.496,00	350.496,00	6,00
7.01.7.01.0.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.309.700	-	-	-	-	-	-	59.066.500,00	1.710.000,00	60.776.500,00	60.776.500,00	533.200,00
7.01.7.01.0.001.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.049.700	-	-	-	-	-	-	24.816.500,00	1.710.000,00	26.526.500,00	26.526.500,00	523.200,00
7.01.7.01.0.001.2.09 .01.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.549.700	-	-	-	-	-	-	1.026.500,00	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00	523.200,00
7.01.7.01.0.001.2.09 .01.5.1.02.03.02.003 6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000	-	-	-	-	-	-	20.790.000,00	1,710,000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.09 .01.5.1.02.03.02.003 8.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-
7.01.7.01.0.001.2.09 .09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.160.000	-	-	-	-	-	-	32.150.000,00	0,00	32.150.000,00	32.150.000,00	10.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09 .09.5.1.02.03.03.000 1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.208.000	-	-	-	-	-	-	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	8.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
7.01.7.01.0.001.2.09 .09.5.1.02.03.03.004 0.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	5.952.000	-	-	-	-	-	-	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	2.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.820.000	-	-	-	-	-	-	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	-
7.01.7.01.0.003.2.01 .01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.820.000	-	-	-	-	-	-	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	-
7.01.7.01.0.003.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	-	-	-	-	-	-	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-
7.01.7.01.0.003.2.01 .01.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-
7.01.7.01.0.005.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.017.500	-	-	-	-	-	-	3.017.500,00	0,00	3.017.500,00	3.017.500,00	-
7.01.7.01.0.005.2.01 .03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.017.500	-	-	-	-	-	-	3.017.500,00	0,00	3.017.500,00	3.017.500,00	-
7.01.7.01.0.005.2.01 .03.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.017.500	-	-	-	-	-	-	3.017.500,00	0,00	3.017.500,00	3.017.500,00	-

JUMLAH	1.405.182.053,00	936.158.416,00	101.275.027,00	1.037.433.443,00	0,00	-	0,00	281.057.492,00	15.031.248,00	296.088.740,00	1.333.522.183,00	71.659.870,00
Penerimaan :												
- SP2D		936.698.416,00	101.275.027,00	1.037.973.443,00	-	-	-	296.815.492	13.890.248	310.705.740,00	1.348.679.183,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	5.354.787	-	5.354.787	5.354.787	
b. PPh-21		23.088.068	4.268.826	27.356.894	-	-	-	2.267.500	177.500	2.445.000	29.801.894	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	670.483	-	670.483	670.483	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	140.755	-	140.755	140.755	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :		959.786.484,00	105.543.853,00	1.065.330.337,00	-	-	-	306.789.017	14.067.748,00	320.856.765,00	1.386.187.102,00	
Pengeluaran :												
- SPJ(LS+UP/GU/TU)		936.158.416,00	101.275.027,00	1.037.433.443,00	-	-	-	281.057.492	15.031.248	296.088.740	1.333.522.183,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	5.354.787	-	5.354.787	5.354.787	
b. PPh-21		23.088.068	4.268.826	27.356.894	-	-	-	2.267.500	177.500	2.445.000	29.801.894	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	670.483	-	670.483	670.483	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	140.755	-	140.755	140.755	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		540.000,00	-	540.000,00	-	-	-	1.898.000,00	12.719.000,00	14.617.000,00	15.157.000,00	
Jumlah Pengeluaran :		959.786.484,00	105.543.853,00	1.065.330.337,00	-	-	-	292.929.017,00	27.927.748,00	320.856.765,00	1.386.187.102,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	13.860.000,00	(13.860.000,00)	-	-	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

SUNARDI, S.Pd.M.TPd

NIP. 19751128 200604 1 005

Painan, 29 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

MURNIATI, S.Sos

NIP.198001202007012020